

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

“ANALISIS INVESTASI SEKTOR PUBLIK”

Dosen Pengampu:

Dr.Pujiati,S.Pd.,M.Pd.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh Kelompok 6:

Bagas Muhamad Satria 2313031037

Dita Silviana Putri 2313031057

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Analisis Investasi Sektor Publik” dengan tepat waktu tanpa ada halangan.

Ucapan terima kasih kami saimpaikan kepada Ibu Dr.Pujiati, S.Pd., M.Pd., Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A., dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini. Selain itu, kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini.

Kami juga berharap dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2025

Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian Investasi Sektor Publik	3
2.2 Aspek Kelayakan Investasi	3
2.3 Jenis-jenis Investasi Sektor Publik.....	5
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Publik	7
2.5 Teknik Dasar Penilaian Investasi Sektor Publik	8
BAB III PENUTUP.....	11
3.1 Kesimpulan.....	11
3.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara efisien dan efektif, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin. Di kebanyakan negara berkembang anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan investasi sektor publik?
2. Apa sajakah aspek dalam kelayakan akuntansi sektor publik?
3. Apa sajakah jenis-jenis investasi sektor publik?
4. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi investasi sektor publik?
5. Apa sajakah teknik yang digunakan untuk dasar penilaian akuntansi sektor publik?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dari investasi sektor publik.
2. Untuk mengetahui beberapa aspek dari kelayakan investasi sektor publik.
3. Untuk mengetahui jenis-jenis investasi sektor publik.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi investasi sektor publik.
5. Untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam investasi sektor publik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Investasi Sektor Publik

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/ atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomik, sosial dan manfaat lainnya. Dengan definisi tersebut, sehingga investasi pemerintah daerah dapat dilakukan dalam bentuk: (1) Investasi surat berharga dan (2) Investasi langsung berupa penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah daerah untuk membiayai suatu kegiatan usaha, dimana investasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi bidang infrastruktur (jalan, bangunan, jaringan listrik, air, dan lain-lain) dan bidang yang lainnya.

Jadi, Investasi Sektor Publik adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sederhananya adalah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun infrastruktur, fasilitas umum, atau program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.2. Aspek Kelayakan Investasi

Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling memengaruhi.

1. Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus di- pertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.

2. Aspek Sosial dan Budaya

Untuk melaksanakan suatu proyek maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan.

3. Aspek Ekonomi dan Finansial

Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas, dan likuiditas perlu dipertimbangkan.

4. Aspek Distribusi

Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi; dari mana mendapatkan modal untuk melaksanakan proyek, apakah dari public revenue atau oleh individu; apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak; apakah proyek dijalankan oleh public agencies atau oleh individu. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik (equity and equality).

2.3. Jenis-jenis Investasi Sektor Publik

Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja/unit organisasi dipemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap, kegiatan tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Berbagai jenis investasi sektor publik harus dikelompokan dalam beberapa kategori investasi, antara lain:

1. Investasi Sosial yang Lebih Memperhatikan Aspek Keberpihakan pada Kelompok Masyarakat Tertentu

Keahlian teknis yang dilatih oleh relawan PKK seringkali tidak berdampak pada gerakan ekonomi di masyarakat, karena mereka tidak memiliki peralatan untuk menjalankan keahliannya, sehingga mereka harus diberi penguatan modal untuk menjalankan keahlian teknis yang dimilikinya. Contoh yang dapat diambil adalah ibu-ibu yang sudah memperoleh keahlian teknis juru paes, tidak dapat serta merta menjadi juru paes, mereka harus diberikan fasilitas yang cukup untuk melakukannya. Investasi dalam sektor sosial kemasyarakatan ini mempunyai spektrum yang sangat luas terkadang hanya sekedar program berskala nasional. Kepentingan politis jangka pendek mengiringi pelaksanaan investasi sosial. Program-program pemberdayaan masyarakat lebih bersifat label, karena membutuhkan komitmen jangka panjang, sedangkan program yang mempunyai konstruksi konsep berpikir yang bagus dan komprehensif justru tidak mudah dilaksanakan.

2. Investasi untuk Membentuk Generator Pertumbuhan yang Difokuskan pada Kebijakan Strategis untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Pertumbuhan suatu wilayah ditentukan dari pembangunan infrastruktur, aktivitas, sarana, maupun prasarana. Investasi sebagai generator pertumbuhan kawasan, tidak dapat diukur dengan pengembalian dana secara langsung diperoleh dari objek investasi semata, tetapi seberapa jauh aktivitas ikutan atau lingkungan kawasan mampu menciptakan kegiatan ekonomi ikutan yang dikelola kemudian hari, mampu dikembangkan menjadi sumber-sumber penerimaan daerah. Kriteria ini menjadi penting

karena fungsi investasi sektor publik dalam pengembangan kawasan justru pada seberapa besar keberhasilan menciptakan aktivitas perekonomian di kawasan tersebut. Generator ekonomi memiliki nilai positif jika secara keseluruhan aktivitas menimbulkan nilai-nilai baru pada struktur perekonomian pada suatu kawasan. Jika pengaruhnya negatif, infrastruktur tersebut justru akan menyusutkan nilai kawasan, dan justru akan menjadi beban yang terus menerus bagi perekonomian daerah. Generator ekonomi dapat dinilai dengan benefit cost ratio, dibandingkan dengan analisis investasi model sektor bisnis, sungguhpun aktivitas generator ekonomi juga merupakan aktivitas bisnis juga.

3. Investasi untuk Layanan Publik

Investasi untuk memenuhi kepentingan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sarana prasarana dan fasilitas umum lainnya. Jenis investasi ini tidak akan memperoleh aliran masuk, justru kadangkala akan berubah menjadi cost center. Investasi ini berfungsi melayani sektor aktivitas ekonomi lainnya, meskipun tanpa adanya aliran masuk.

4. Investasi untuk Menciptakan Return yang Baik

Investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dapat dioperasikan dalam dua pola yaitu pola intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, serta investasi dalam bisnis di sektor hulu dan hilir dalam struktur perekonomian lokal. Pola pertama yang terkait dengan PAD lebih bersifat politis guna mengadvokasi kepentingan masyarakat luas. Besaran hasil pemungutan pajak maupun retribusi daerah sangat tergantung pada kesediaan masyarakat dalam menyumbangkan dananya untuk kepentingan daerah. Keputusan mengenai hal ini biasanya sangat dipengaruhi kepentingan diberbagai pihak yang terkait dengan bisnis dalam koridor sumber-sumber keuangan masyarakat. Investasi dalam sektor ini lebih menekankan pada pembentukan perangkat sistem guna melaksanakan tugas pengumpulan jenis-jenis pajak maupun retribusi daerah.

5. Investasi untuk Menciptakan Business Baru yang Lebih Mengedepankan pada Upaya Inovatif

Kekuatan ekonomi pada suatu bangsa atau daerah salah satunya adalah kemampuan melakukan inovasi guna merekayasa produk-produk baru ke dalam sistem perekonomian. Rekayasa teknologi maupun rekayasa sistem sebetulnya mempunyai dimensi ekonomi yang sangat tinggi di masa yang akan datang.

6. Investasi yang Menciptakan Penghematan maupun Peningkatan Kapasitas Ketugasannya pada Aparatur Pemerintah Daerah yang Ukurannya adalah Efisiensi

Biaya-biaya operasi dalam suatu organisasi perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan di organisasi. Cost centre menjadi beban berat bagi jalannya suatu ubit organisasi. Penggunaan teknologi maju maupun IT justru dapat dipertimbangkan guna melakukan penghematan beban biaya dari tahun ke tahun. Investasi dalam konteks ini terkait dengan reorganisasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Jadi, Investasi Sektor Publik adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sederhananya adalah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun infrastruktur, fasilitas umum, atau program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi Publik

1. Tingkat Diskonto yang Digunakan

Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu. Proyek yang tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (required rate of return) maka proyek tersebut harus ditolak.

2. Tingkat Inflasi

Penilaian investasi harus mempertimbangkan tingkat inflasi. Inflasi yang semakin tinggi menyebabkan required rate of return juga semakin tinggi.

3. Resiko dan Ketidakpastian

Required rate of return akan semakin tinggi jika investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak

adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi.

4. Capital Rationing

Capital rationing merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Perangkingan investasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini, perangkingan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio manfaat/biaya atau dapat juga menggunakan model pemrograman linear. Sejalan dengan perkembangan manajemen sektor publik, termasuk perkembangan otonomi daerah, maka konsep-konsep sektor privat banyak diaplikasikan di sektor publik, oleh sebab itu, analisis investasi di sektor publik dilakukan dengan pendekatan di sektor privat, namun dilengkapi hal-hal yang dianggap penting untuk analisis investasi dimaksud (Halim dan Subiyanto, 2008).

Investasi dalam sektor publik harus mendapat perhatian lebih karena keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan (Mardiasmo, 2009). Halim dan Subiyanto (2008) menjelaskan bahwa analisis investasi sektor publik difokuskan pada evaluasi terhadap biaya-manfaat suatu proyek/investasi/belanja modal, dimana syarat utama dalam menganalisis dan mengevaluasi penilaian atas besarnya biaya dan manfaat, serta memperkirakan waktu atau umum investasi yang dimaksudkan, namun kuantifikasi biaya dan manfaat di sektor publik tidaklah mudah karena biaya dan manfaat tidak hanya aspek “hasil komersial” dari suatu investasi, tetapi juga aspek sosial, budaya, keamanan, dan lain-lain.

2.5. Teknik Dasar Penilaian Investasi Sektor Publik

Analisis biaya dan manfaat seringkali digunakan sebagai kriteria penilaian investasi dalam sektor publik dalam menilai perolehan manfaat sosial investasi, yang mana pengkuantifikasian biaya dan manfaat seringkali pula mengalami masalah sulitnya pengukuran terhadap kedua hal tersebut. Mardiasmo (2009) menjelaskan empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan

Organisasi sektor public dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi lain.

2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilakukan (cost/benefit relationship)

Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial (sosial cost/benefit) yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Pada organisasi sektor publik biaya dan manfaat seringkali tidak dapat secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya dan manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Dalam analisis biaya manfaat ini, benefit (manfaat) ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan sosial yang diperoleh, sedangkan untuk cost (biaya) ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Sebagai contoh ketika suatu organisasi sektor publik merencanakan membuat sebuah jalan baru, maka akan muncul monetary cost untuk biaya konstruksi dan perawatan. Disamping itu juga akan muncul dalam bentuk perusakan pemandangan, polusi udara, polusi suara, kemungkinan bertambahnya kecelakaan dan sebagainya. Di lain pihak, manfaat sosial yang muncul berupa pengurangan kemacetan lalu lintas, mempercepat perjalanan, mengurangi biaya pendistribusian barang dan lain sebagainya.

3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah

Terkadang terdapat kesulitan dalam menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya sosial. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektifitas biaya (cost effectiveness analysis).

4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektifitas biaya tinggi

Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan, bahkan beberapa diantaranya tidak dapat dipakai dalam pengukuran yang objektif dalam bentuk moneter.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Investasi Sektor Publik adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari deal budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin.

3.2 Saran

Dalam penyusunan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan baik dalam segi struktur makalah ataupun kelengkapan isi materi yang dibahas. Namun, hal tersebut harus di perbaiki kedepannya agar lebih baik lagi, sehingga materi dapat tersampaikan secara lengkap dan jelas.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca yang dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Murwani, A. S. (2011). *Analisis Investasi Pada Sektor Publik*. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 14(1), 39-51.
- Prof. Dr. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI(Anggota IKAPI).
- Wahyuni, A. S. (2011). *Analisis Investasi Sektor Publik*. Wahana ; Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 39-51.
- Yuanita, D. W., Dewi, C. N., & Setyowati, S. M. (2023). *Kinerja dan Investasi Sektor Publik Sebagai Bentuk Pelayanan Daerah ; Sebuah Telaah Pustaka*. JIAK; Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 23-33.

STUDI KASUS

Pemerintah Indonesia membangun Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah sangat padat, sekaligus mendukung ekspor otomotif dari kawasan industri Karawang dan Bekasi. Biaya yang dikeluarkan cukup besar, sekitar Rp 43 triliun, yang berasal dari APBN, pinjaman luar negeri (JICA/Jepang), dan kerja sama dengan swasta.

Harapannya, pelabuhan ini bisa:

- mempercepat arus barang,
- mengurangi biaya logistik,
- memperlancar ekspor,
- membuka lapangan kerja baru,
- serta mendorong ekonomi daerah sekitar Subang.

Namun, ada beberapa tantangan, yaitu biaya investasi sangat besar, pendapatan di awal kemungkinan kecil karena butuh waktu untuk menarik pengguna, dan ada risiko investor swasta kurang tertarik.

Pertanyaan

1. Apakah proyek ini menguntungkan secara finansial (uang yang masuk dibanding biaya)?
2. Apa yang bisa dilakukan pemerintah supaya proyek ini berjalan lancar dan bermanfaat?

Jawaban

1. Dari sisi finansial, kalau hanya dihitung dari pemasukan pelabuhan (tarif bongkar muat, biaya jasa, dll.), proyek ini kurang menarik. Tingkat keuntungan sekitar 6–8%, lebih rendah dari standar yang biasanya dicari investor swasta (10–12%). Jadi secara keuangan murni, ini kurang menguntungkan.
2. Strategi pemerintah:
 - Mengajak swasta melalui skema kerja sama (PPP) dengan insentif agar lebih menarik.

- Mempercepat pembangunan jalan tol dan kereta api menuju pelabuhan, supaya akses lebih mudah.
- Memperbaiki sistem pelayanan dengan digitalisasi agar proses eksport-impor cepat dan transparan.
- Memberdayakan UMKM dan pekerja lokal supaya masyarakat sekitar juga ikut merasakan manfaat langsung.